

Analisis perlakuan PPN atas penyerahan jasa warehousing barang kena pajak untuk tujuan ekspor oleh industri freight forwarding: studi kasus PT. XYZ = Analysis of value added tax on supply of warehousing service for taxable goods to be exported by freight forwarding company: case study PT. XYZ

Annisa Sakdiah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20457517&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai sengketa pajak atas penyerahan jasa warehousing penyimpanan komponen elektronik berupa IC yang membutuhkan treatment khusus dalam hal penyimpanannya. Jasa warehousing tersebut merupakan salah satu jasa dari aktivitas handling barang oleh freight forwarder PT. XYZ yang mana PT. XYZ menganggap bahwa atas jasa penyimpanan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan jasa tersebut melekat pada barang bergerak untuk tujuan ekspor.

Pendekatan analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan cara melihat pengenaan PPN berdasarkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai secara umum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, peraturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE, peraturan freight forwarding, dan peraturan lain yang berkaitan dengan jasa melekat pada barang untuk tujuan ekspor seperti PMK Nomor 70 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 30 tahun 2011. Terakhir, dengan cara melihat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa ini ditinjau dari asas kepastian dan netralitas pajak.

.....

This thesis discussed about tax dispute on warehousing service of an electronic component IC which needed a special treatment handling for its storage warehouse. Warehousing service is one of cargo handling activity that is provided by freight forwarding company to its client PT. ABC. PT. XYZ assumed that its warehousing service is not a subject to Value Added Tax because it is related to goods to be exported KITE.

This thesis analysis was based on Value Added Tax regulation, KITE regulations, freight forwarding regulations, and other regulations that are related to services that attached to goods to be exported such as PMK Nomor 70 Tahun 2010. This thesis also analyzed through neutrality and certainty principle in taxation.